

Strategi Diplomasi Pengetahuan *German Academic Exchange Service (DAAD)* Dalam Mendukung Kerjasama Internasional Bidang Pendidikan Tinggi di Indonesia

Muhammad Faisal Aziz¹ Rizki Septin Amalia²

Abstract

This article analyzes the strategies of the German Academic Exchange Service (DAAD) in supporting international collaboration in higher education, particularly in Indonesia. The issue examined is the role of DAAD as an instrument of public diplomacy and knowledge within the framework of German foreign policy. This research employs a qualitative descriptive method through a literature review of official DAAD sources and academic literature. The DAAD not only reinforces Germany's image as a knowledge-based nation but also builds strategic bilateral relationships through academic exchange programs. Thus, it can be concluded that the knowledge diplomacy carried out through the DAAD is an effective approach in expanding Germany's influence collaboratively on the global stage.

Keywords: International Relations, DAAD, Soft Power, Knowledge Diplomacy.

Abstrak

Artikel ini menganalisis strategi dari *German Academic Exchange Service (DAAD)* dalam mendukung kolaborasi internasional di bidang pendidikan tinggi, khususnya di Indonesia. Isu yang ditelaah adalah peran DAAD sebagai instrumen diplomasi publik dan pengetahuan dalam kerangka kebijakan luar negeri Jerman. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui kajian pustaka dari sumber resmi DAAD serta literatur akademis. DAAD tidak hanya memperkuat persepsi Jerman sebagai negara yang berpengetahuan, tetapi juga membangun hubungan bilateral strategis melalui program-program pertukaran akademik. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa diplomasi pengetahuan yang dijalankan melalui DAAD merupakan pendekatan yang efektif dalam memperluas pengaruh Jerman secara kolaboratif di arena global.

Kata kunci: Hubungan Internasional, DAAD, *Soft Power*, Diplomasi Pengetahuan.

Pendahuluan

Dalam konteks globalisasi serta revolusi informasi, dinamika hubungan internasional mengalami perubahan signifikan. Negara tidak lagi berdiri sebagai satu-satunya aktor dominan; kini organisasi internasional, lembaga swadaya masyarakat LSM, perusahaan multinasional, dan lembaga pendidikan juga memainkan peran strategis dalam membentuk tatanan dunia. Salah satu sektor yang mengalami transformasi mendalam adalah pendidikan tinggi, yang kini berfungsi sebagai instrumen dalam diplomasi serta pengembangan global.

¹ Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Mulawarman, mfaisalaziz@fisip.unmul.ac.id

² Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Mulawarman, rizkiamalia@fisip.unmul.ac.id

Hubungan internasional mengalami peningkatan fokus pada peran aktor negara dan non-negara, strategi baru, isu-isu tradisional yang penting, serta tantangan kontemporer seperti perubahan iklim, ketahanan pangan, pandemi, hak asasi manusia, migrasi, mengalami perubahan besar dari perspektif perdamaian, keamanan, dan pembangunan ekonomi (F. Cooper et al., 2013). Lanskap pendidikan tinggi internasional, penelitian dan inovasi juga terus berkembang dengan universitas-universitas gabungan internasional, pusat keunggulan regional, jaringan penelitian internasional dan tematik, pusat pendidikan/pengetahuan dan pembangunan perkotaan adalah beberapa di antaranya (McVeigh, 2010).

Dinas Pertukaran Akademis Jerman (DAAD) merupakan lembaga yang mendukung universitas-universitas Jerman dan mahasiswanya. Selain memberikan program beasiswa, DAAD juga menggalang internasionalisasi universitas Jerman, memperkuat studi tentang Jerman dan pengajaran bahasa Jerman di luar negeri, membantu negara-negara berkembang dalam mendirikan institusi pendidikan yang efektif, serta memberikan rekomendasi terkait kebijakan pendidikan, pengetahuan internasional dan pembangunan (DAAD, 2023). Kebijakan pendidikan di Jerman adalah tanggung jawab tiap negara bagian. Ini berarti, Jerman tidak memiliki tunggal sistem pendidikan tinggi, melainkan 16 sistem, satu untuk setiap negara bagian, tetapi semuanya mirip.

Penting untuk memanfaatkan perubahan dalam diplomasi dan pendidikan tinggi internasional untuk mengembangkan pendekatan kolaboratif guna memecahkan masalah-masalah global yang mendesak. Di era informasi saat ini, pemerintah terus berupaya menjalin hubungan dengan warga negara asing dan aktor non-negara untuk membangun, memelihara, dan memperkuat citra positif mereka di luar negeri. Meskipun ada banyak alat untuk mencapai tujuan ini, seperti penyiaran internasional, media sosial, dan program budaya, ada satu alat yang sering diabaikan yaitu pertukaran pendidikan. Meskipun sebagian besar negara maju terus menjalankan program pertukaran, tidak ada negara yang berinvestasi sebanyak Jerman. Apa alasan investasi ini? Dalam komunitas pendidikan tinggi global, Jerman dipandang sebagai negara dengan banyak peluang bagi mahasiswa, khususnya mahasiswa pascasarjana. Tujuan ini layak secara finansial bagi siswa berkat beragam beasiswa yang didanai oleh pemerintah negara bagian dan federal Jerman. Pendirian dan pengelolaan program dan beasiswa ini merupakan tanggung jawab organisasi independen, khususnya Badan Pertukaran Akademik Jerman (DAAD).

Urgensi kajian ini terletak pada semakin pentingnya pendidikan sebagai alat *soft power* dalam kebijakan luar negeri negara-negara maju, termasuk Jerman. DAAD, sebagai lembaga pertukaran akademik terbesar di dunia, telah menjadi strategi internasionalisasi pendidikan tinggi Jerman. Di Indonesia, kolaborasi dengan DAAD tidak hanya berpengaruh pada mobilitas akademik, tetapi juga dalam pembangunan kapasitas kelembagaan serta penguatan hubungan bilateral.

Signifikansi penelitian ini adalah untuk memahami fungsi DAAD sebagai instrumen diplomasi pengetahuan yang dapat menjembatani kepentingan nasional Jerman dengan kebutuhan pengembangan pendidikan di negara mitra seperti Indonesia. Dengan menganalisis strategi, aktor, dan pendekatan DAAD, artikel ini memberikan kontribusi bagi literatur

mengenai diplomasi publik dan pendidikan tinggi internasional, serta menawarkan perspektif baru dalam kajian hubungan internasional kontemporer.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam riset ini adalah metode deskriptif yang berupaya menggambarkan secara jelas karakteristik objek yang diteliti secara tepat. Teknik pengumpulan data dan analisis melalui penelusuran studi pustaka yang berasal dari artikel jurnal dan media internet yang dikeluarkan oleh situs resmi pemerintah Jerman maupun dari DAAD Jerman.

Kerangka Teoritis

Artikel ini dimulai dengan tinjauan literatur mengenai pentingnya pertukaran pendidikan dan pentingnya DAAD sebagai administrator utama berbagai program ini. Selanjutnya, saya ingin membahas implikasi dari bukti ini terhadap diplomasi publik, yang merupakan prinsip utama kebijakan luar negeri Jerman. Dukungan kuat yang terus menerus dari pemerintah Jerman terhadap program pertukaran dan DAAD adalah contoh bagaimana teori diplomasi publik dan nilai soft power telah menjadi yang terdepan dalam institusi kebijakan luar negeri.

Soft Power

Selama dekade terakhir, akademisi dan analis kebijakan semakin tertarik untuk melegitimasi kontribusi pendidikan tinggi internasional terhadap pembangunan ekonomi nasional dan transisi menuju ekonomi berbasis pengetahuan. Diskusi-diskusi ini kini telah diperluas hingga mencakup pendidikan tinggi sebagai alat *soft power*.

Meningkatnya penggunaan *soft power* juga mempunyai implikasi yang luas terhadap sifat hubungan antar negara. Dikembangkan oleh Joseph Nye, istilah "*soft power*" mengacu pada penggunaan pengaruh dan persuasi untuk mempengaruhi orang lain dan mendukung kepentingan suatu negara, bukan kekuatan militer atau sanksi ekonomi, yang biasa disebut sebagai "*hard power*" (J. S. . Nye, 2006). Nye juga mengemukakan bahwa istilah paksaan atau perintah biasanya diartikan sebagai "*hard power*", sedangkan "*soft power*" diartikan dengan konsep melalui pesona dan persuasi (Kavalski, 2011). Pengenalan dan penggunaan istilah "*soft power*" oleh Nye berdampak besar pada konseptualisasi meningkatnya peran pendidikan tinggi internasional dalam diplomasi.

	Behaviors	Primary Currencies	Government Policies
Military Power	- coercion - deterrence - protection	- threats - force	- coercive diplomacy - war - alliance
Economic Power	- inducement - coercion	- payments - sanctions	- aid - bribes - sanctions
Soft Power	- attraction - agenda-setting	- values - culture - policies - institutions	- public diplomacy - bilateral and multilateral diplomacy

Tabel 1. Hard Power and Soft Power

Sumber: (Kavalski, 2011)

Seiring dengan itu, konsep diplomasi yang sebelumnya diartikan sebagai hubungan antar negara dan metodenya juga mengalami perubahan. Pengetahuan, budaya, dan komunikasi mulai menjadi elemen politik internasional, dan diplomasi bertujuan menggunakan elemen-elemen ini untuk mempengaruhi opini publik.

Menurut Nye, Diploma Publik terdiri dari tiga bidang. Salah satunya adalah komunikasi sehari-hari, yang terutama mencakup tugas sehari-hari seperti menjelaskan keputusan politik saat ini dan menanggapi peristiwa politik. Komunikasi strategis dan berjangka panjang yang ditujukan untuk mempromosikan proyek jangka panjang, membangun citra, kampanye periklanan, dan bidang ketiga adalah membangun hubungan (Cowan & Cull, 2008). Kesamaan dari definisi yang diusulkan adalah bahwa untuk dianggap sebagai diplomasi publik, diplomasi tersebut harus berdampak pada pesa negara tujuan (Doğan, 2019).

Beberapa negara melihat pendidikan sebagai salah satu metode yang paling efisien untuk meningkatkan kepentingan nasional di komunitas internasional, khususnya negara-negara besar yang telah mulai memberikan perhatian khusus pada pemanfaatan pendidikan sebagai alat atau sumber *soft power*. Sistem pendidikan nasional yang berhasil juga dapat mendukung penciptaan citra yang lebih positif di komunitas internasional, sehingga semakin memperkuat *soft power* negara tersebut (Wojciuk et al., 2015).

Menurut Joseph Nye, konsep *soft power* dari suatu negara berasal dari budaya, nilai-nilai politik, dan kebijakan luar negerinya. Nye melihat aspek budaya sebagai kumpulan nilai dan praktik yang memberikan makna bagi suatu komunitas dan memiliki banyak ekspresi. Ketika budaya suatu negara merepresentasikan nilai-nilai universal dan kebijakannya menekankan nilai-nilai serta kepentingan yang dipegang bersama dengan negara lain, daya tarik yang dihasilkannya meningkatkan peluang tercapainya hasil yang diharapkan. Nilai-nilai politik dianggap sebagai komitmen pemerintah terhadap pelaksanaan demokrasi, kolaborasi dalam organisasi internasional, dan promosi perdamaian serta hak asasi manusia dalam kebijakan luar negerinya. Terakhir, dimensi kebijakan luar negeri diartikan sebagai alat *soft power* dari suatu negara (J. Nye, 2017).

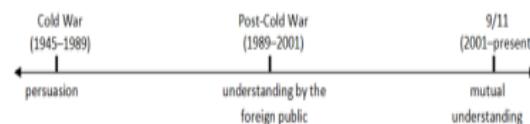
Contoh *soft power* yang paling sering diimplementasi dalam pendidikan tinggi adalah program *Fulbright*, hasil kerja *British Council*, Inisiatif Pertukaran Akademik Jerman (DAAD), dan Proyek Erasmus Mundus. Hal ini jelas merupakan program yang telah berjalan lama, serta telah diterima dengan baik dan memberikan kontribusi yang signifikan (Knight, 2014a).

DAAD memposisikan dirinya sebagai pionir mengenai internasionalisasi pendidikan tinggi dan penelitian serta menganggap sebagai organisasi berpengaruh dalam diplomasi pendidikan. Pada tahun 2019, total anggaran DAAD adalah €594 juta dan memberikan beasiswa kepada 145.659 siswa dan guru. Dari jumlah tersebut, 60.581 orang berasal dari luar negeri dan 85.078 orang merupakan warga negara Jerman. Namun, penerapan strategi ini bergantung pada sistem pendidikan tinggi di 16 negara bagian dan berbagai universitas (Pekşen & Leišytė, n.d.).

Strategi Federal dan DAAD saat ini, komitmen berkelanjutan terhadap internasionalisasi melalui sumber daya pemerintah yang signifikan, dan semakin pentingnya internasionalisasi di semua negara merupakan hal yang penting bagi pemerintah Jerman dan semua pemangku kepentingan. Dalam hal pendidikan tinggi, hal ini menunjukkan adanya minat yang serius dalam ilmu pengetahuan dan pendidikan. Mencapai inovasi yang berdaya saing global serta kepemimpinan global yang didasarkan pada tradisi yang telah lama ada tampaknya berjalan melalui pendekatan *soft power* dan *hard power*, tergantung pada tingkat politiknya (Leišytė, 2021).

Public Diplomacy

Istilah diplomasi publik pertama kali digunakan oleh mantan Duta Besar AS Edmund Gallion dan Edward R. Murrow, direktur Pusat Diplomasi Publik di Sekolah Hukum dan Diplomasi Fletcher di Universitas Tufts. Gallion meyakini ada kesamaan antara diplomat dan jurnalis. Ia mengartikan diplomasi publik sebagai suatu bentuk mempengaruhi opini publik yang mempengaruhi jalannya diplomasi. Peran teknologi informasi mempengaruhi orang-orang berpengaruh, sikap masyarakat, dan pemerintah asing. Media dan jurnalisme, masyarakat umum dan kelompok kepentingan juga merupakan orang-orang yang berpengaruh (Pamment, 2013). Menurut analisis Gallion (Auer & Srugies, 2013) mengelompokkan definisi dan konseptualisasi diplomasi publik:



Gambar 1. Definitions Influenced by Distinct Global Paradigm.

Sumber: (Auer & Srugies, 2013).

Diplomasi publik semakin mendapat perhatian dalam beberapa tahun terakhir, baik di kalangan profesional maupun akademis. Meskipun diplomasi publik telah digunakan sejak awal abad ke-20, konsep tersebut baru dieksplorasi pada akhir tahun 1960an. Setelah berakhirnya Perang Dingin, perdebatan akademis mengenai konsep ini dimulai di Amerika Serikat. Sejak serangan teroris 11 September 2001, pertimbangan ilmiah mengenai diplomasi publik telah terbentuk, khususnya di Amerika Serikat dan negara-negara Eropa (Snow & M. Taylor, 2009).

Pemerintah memahami konsep-konsep ini jauh sebelum istilah diplomasi publik digunakan, dan pendidikan tinggi selalu menjadi bagian penting dari proses ini. Di Amerika Serikat, program *Fulbright* adalah contoh yang sangat baik tentang bagaimana diplomasi publik dipromosikan melalui pendidikan tinggi. Program ini telah ada selama hampir 70 tahun dan bertujuan untuk meningkatkan saling pengertian antara masyarakat dan negara.

Meskipun *Fulbright* belum diadopsi oleh negara lain, terdapat upaya terorganisir lainnya untuk memperluas diplomasi nasional melalui pendidikan. Misalnya, *British Council* menggambarkan dirinya sebagai organisasi internasional Inggris untuk kesempatan pendidikan

dan hubungan budaya. *Deutsche Academic Exchange* (DAAD) Jerman dan program Erasmus Mundus dari Komisi Eropa mempunyai tujuan serupa. Contoh di Asia adalah Institut Konfusius di Tiongkok dan lembaga baru yang berbasis di Malaysia yang didirikan untuk membina kerja sama pendidikan dengan negara-negara di kawasan ASEAN (Peterson, 2013).

Organisasi terpenting dalam diplomasi publik Jerman adalah Goethe-Institut di Munich, Deutsche Welle Media, *German Academic Exchange Office* (DAAD) di Bonn, *Alexander von Humboldt Foundation* (AvH) di Bonn, IFA (*Institute for Public Relations*) di Stuttgart, Kantor Pusat Sekolah Asing (ZfA) di Cologne, Institut Arkeologi (Institut Arkeologi Jerman) di Berlin serta organisasi politik, organisasi masyarakat sipil lainnya dan sektor swasta. Sifat perantara yang terdesentralisasi dapat dilihat di lokasi kantor pusatnya masing-masing, namun beroperasi di bawah wewenang Departemen Luar Negeri dan bertanggung jawab untuk melaporkan dan mencapai tujuan departemen secara keseluruhan (Doğan, 2019).

Layanan Pertukaran Akademis Jerman (DAAD) juga memainkan peran serupa. Negara-negara Eropa lainnya, seperti Swedia dan Belanda, mengikuti contoh Inggris dan Jerman dan mendirikan lembaga mereka sendiri untuk mempromosikan Diplomasi Publik melalui Pendidikan. Sebelum keruntuhannya, Uni Soviet menawarkan sejumlah besar beasiswa kepada pelajar dari negara-negara berkembang untuk mendapatkan dukungan selama Perang Dingin (Rizvi, 2020).

Selain itu, Jerman memiliki jaringan diplomat sains yang aktif di negara-negara yang memainkan peran penting dalam kerja sama sains dan teknologi serta sumber dayanya. Jika kita memperhatikan tujuan perekonomian Jerman, khususnya di bidang teknologi maju, menjadi jelas bahwa pemerintah federal secara khusus memberikan subsidi. Selain itu, strategi diplomasi pendidikan Jerman pada dasarnya bertujuan untuk memperkuat peran kepemimpinannya di Uni Eropa, sesuai dengan kepentingan nasional.

Knowledge Diplomacy

Selama kurang lebih dua puluh tahun, gagasan masyarakat berbasis pengetahuan telah menjadi banyak perdebatan. Merupakan konsep pasca industri dimana pengetahuan merupakan motor penggerak pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial budaya masyarakat dan bangsa. Penekanan pada pengetahuan menyoroti peran penting pendidikan tinggi dan pendidikan secara umum di dunia saat ini. Pendidikan tinggi tidak hanya berfungsi untuk mempersiapkan warga negara dan pekerja masa depan tetapi juga menciptakan pengetahuan baru dan menyebarkannya untuk kepentingan komunitas dan masyarakat luas.

Dalam dunia diplomasi kontemporer yang berubah dengan cepat, pendidikan tinggi mempunyai peran dan kontribusi yang penting. Tradisi panjang pendidikan tinggi dalam kerja sama ilmiah dan mobilitas akademik, serta inovasi terkini dalam jaringan penelitian dan kebijakan memberikan banyak kontribusi dalam membangun dan memperkuat hubungan internasional antar negara dan kawasan melalui penyebaran dan pertukaran pengetahuan, singkatnya lagi diplomasi pengetahuan.

Dalam penelitian terbarunya, Knight mengusulkan definisi diplomasi pengetahuan sebagai berikut, “Proses membangun dan memperkuat hubungan antar dan di dalam negara

melalui pendidikan tinggi internasional, penelitian, dan inovasi” (Knight, 2022). Dalam definisi tersebut, diplomasi secara sadar digambarkan sebagai suatu proses, serangkaian tindakan yang bertujuan untuk mencapai suatu hasil. Kerangka konseptual merupakan alat analisis untuk mengeksplorasi makna dan memperdalam pemahaman suatu konsep, seperti diplomasi pengetahuan dengan mengidentifikasi dan mengklasifikasikan elemen atau konsep yang mendasari suatu fenomena (Jozkowski, 2017).

Seperti terlihat pada Tabel 2 di bawah ini, kerangka konseptual yang diusulkan lebih berorientasi pada fenomena dan proses diplomasi pengetahuan dibandingkan kebijakan dan teori diplomasi pengetahuan. Struktur kerangka konseptual yang diusulkan untuk diplomasi pengetahuan didasarkan pada lima elemen mendasar: Pertama, niat, tujuan, atau pendorong. Kedua, berbagai aktor dan mitra. Ketiga, prinsip dan nilai yang mendasari. Keempat, metode atau pendekatan utama yang digunakan, dan Kelima, adalah aktivitas atau instrumen (Knight, 2022).

Intentions, Purpose, Rationales 1	Actors, Partners 2	Principles, Values 3	Modes, Approaches 4	Activities, Instruments 5
To build/ strengthen relations between and among countries through international higher education, research and innovation (IHERI)	Government departments and agencies related to education, science, technology, innovation at all levels	Reciprocity Mutuality Cooperation Common ground Exchange Commonality Partnership	Negotiation Communication Representation Conflict Resolution Compromise Collaboration Mediation	<i>Generic:</i> Networks Joint projects Conferences Summits Coalitions Track Two Agreements
To use IHERI to help address global challenges and promote peace and prosperity	Intergovernmental agencies related to IHERI NGOs related to IHERI	Common good Inter-disciplinary Multi-sector Transparency	Conciliation Building trust Dialogue	<i>IHERI specific:</i> Int'l joint universities Student/scholar exchanges Research networks Education/ Knowledge Hubs Scholarships ODA projects Twinning and Joint Degree Programs
To strengthen IHERI through enhanced relations between and among countries	HEIs Research centres Think Tanks Centres of Excellence Research Networks Foundations Innovation Centres Experts Private sector - Multi-national Corp			

Tabel 2. Conceptual Framework for Knowledge Diplomacy.

Sumber: (Knight, 2022).

Intentions, purpose, rationales

Tujuan yang mendasari diplomasi pengetahuan mencakup membangun dan memperkuat hubungan antar negara serta memanfaatkan kerja sama bidang pendidikan untuk mengatasi tantangan global. Fokus diplomasi pengetahuan adalah kerja sama antara berbagai aktor dan mitra dalam mencapai kepentingan bersama. Hal ini dicapai melalui kolaborasi horizontal yang mengakui alasan, kebutuhan dan sumber daya mitra yang berbeda namun sama dalam mencapai pemahaman bersama.

Actors and partners

Universitas dan perguruan tinggi merupakan aktor penting dalam diplomasi pengetahuan, namun sejumlah besar aktor negara dan non-negara juga terlibat. Hal ini mencakup lembaga penelitian, yayasan, perusahaan swasta, organisasi non-negara, pusat pendidikan dan pengetahuan, kota dan bahkan berbagai kementerian/lembaga sektor publik. Diplomasi pengetahuan melibatkan diplomasi bilateral atau multilateral dengan tujuan

membangun hubungan yang lebih kuat antar negara dan berbagi pengetahuan untuk mengatasi isu-isu nasional, regional, atau global serta prioritas penelitian.

Setelah Perang Dunia II, kebijakan luar negeri Jerman berubah karena perubahan komposisi aktor dalam negeri, Jerman mulai menekankan pertukaran sebagai sarana untuk memperbaiki hubungan.

Principles and values

Kebutuhan dan sumber daya yang berbeda dari para pihak menciptakan manfaat dan potensi risiko yang berbeda bagi para mitra. Kerangka konseptual tersebut memperjelas prinsip/nilai dasar diplomasi pengetahuan. Penyajian nilai secara eksplisit tidak berarti bahwa nilai tersebut bersifat preskriptif atau menunjukkan pendekatan yang disukai. Apakah nilai-nilai ini ditafsirkan sebagai sesuatu yang baik atau diinginkan, bergantung pada pihak yang melihatnya yaitu aktor kunci atau pemangku kepentingan dan bergantung pada hasil yang diinginkan.

Modes and approaches

Diplomasi pengetahuan didasarkan pada hubungan horizontal antara aktor-aktor utama dan negara-negara dan berfokus pada kerja sama, negosiasi, dan kompromi sehingga tujuan tercapai dan semua orang mendapat manfaat. Namun, pendekatan diplomasi pada umumnya, dan diplomasi pengetahuan pada khususnya, bergantung pada negosiasi, mediasi, dan resolusi konflik untuk mengatasi perbedaan-perbedaan ini dan menemukan titik temu. Secara umum, diplomasi pengetahuan didasarkan pada pendekatan kooperatif dan saling menguntungkan dalam memecahkan masalah bersama, serta melindungi kepentingan masing-masing negara.

Activities/ Instruments

Kegiatan/instrumen yang umumnya dikaitkan dengan hubungan internasional dan diplomasi meliputi pertemuan bersama, konferensi, negosiasi lanjutan, pertemuan puncak, dan aliansi (F. Cooper et al., 2013). Elemen-elemen ini penting untuk diplomasi secara umum dan juga dapat diterapkan pada diplomasi pengetahuan. Namun, karena diplomasi pengetahuan berfokus pada pendidikan tinggi internasional, penelitian dan inovasi, terdapat aktivitas penting lainnya yang membedakannya dari jenis diplomasi lainnya. Secara tradisional, kegiatan seperti beasiswa dan pertukaran pelajar/peneliti dianggap penting untuk menjalin kemitraan (Spangler & Chouu, 2018), namun seperti yang dibahas, perkembangan modern dalam IHERI (*International Higher Education Research Institut*) seperti universitas yang berafiliasi secara internasional, jaringan penelitian tematik dan interdisipliner internasional, pendidikan/pengetahuan pusat, pusat keunggulan regional, kampus internasional, jaringan alumni, pusat keunggulan dan program kembar memainkan peran penting dalam diplomasi pengetahuan.

Jerman telah menjadi tujuan terbaik untuk belajar di luar negeri karena pendekatan internasionalisasinya yang sudah berlangsung lama dan unik melalui pendekatan yang terstruktur dengan baik dan kolaboratif - pendekatan elektronik yang fleksibel. Peran aktor

perantara, khususnya DAAD, sangat penting dalam konteks ini. Kegiatan dukungan mempromosikan internasionalisasi di tingkat federal dan negara bagian.

Hasil dan Pembahasan

Diplomasi publik digunakan untuk membantu semua pihak memahami budaya, sikap, dan perilaku, membangun dan memelihara hubungan, mempengaruhi pemikiran, dan memobilisasi tindakan untuk memajukan kepentingan dan nilai-nilai mereka. Keterkaitan ini terlihat jelas dalam pertukaran pendidikan internasional, seperti yang dinyatakan oleh Byrne dan Hall, “Pendidikan internasional adalah sarana untuk memungkinkan dan mendorong keterlibatan dan kolaborasi yang tulus di tingkat individu, organisasi, dan komunitas” (Byrne & Hall, 2013). Tujuan dari bagian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana elemen utama kerangka konseptual diplomasi pengetahuan yang diusulkan dapat diterapkan pada situasi kehidupan nyata. Untuk tujuan ini upaya diplomasi pendidikan dianalisis untuk menunjukkan bagaimana elemen mendasar teori diplomasi pengetahuan dapat diterapkan.

Seperti banyak negara lain, Jerman telah melakukan upaya signifikan untuk menginternasionalkan sektor pendidikan tingginya. Meskipun Jerman merupakan tujuan yang menarik bagi pelajar dari banyak negara, menarik 368,717 pelajar internasional pada tahun 2021, universitas-universitas di Jerman tidak menempati peringkat tinggi dalam peringkat dunia (Times Higher Education, 2023). Oleh karena itu, untuk menarik lebih banyak pelajar untuk belajar di negara ini, upaya ekstensif dilakukan untuk mempromosikan dan mengintegrasikan pelajar asing dengan lebih baik.

Hubungan yang menentukan pertukaran pendidikan harus bersifat timbal balik bagi semua pihak yang terlibat. Argumen ini juga dikemukakan oleh Jane Knight bahwa “Alternatif terhadap paradigma kekuasaan, baik lunak maupun timbal balik, adalah konsep diplomasi yang menjadikan negosiasi sebagai salah satu pilar utamanya” (Knight, 2014b). Hal ini karena kebijakan luar negeri telah berubah secara signifikan. Proses ini telah beralih dari proses yang awalnya berpusat pada negara dan melibatkan lebih banyak aktor dan lebih banyak isu seperti kesehatan, iklim, dan teknologi. Ini bukan hanya soal perdamaian dan keamanan, yang telah menjadi prioritas setiap negara di masa lalu.

Organisasi perantara Jerman adalah sekelompok aktor profesional, yang masing-masing mempunyai tugas khusus untuk memajukan hubungan Jerman-Indonesia. Dalam hal ini Badan Pertukaran Akademik Jerman (DAAD) merupakan lembaga pendanaan terbesar di dunia untuk pertukaran akademik internasional dan memainkan peran penting dalam proses internasionalisasi universitas-universitas Jerman. Tugasnya meliputi pemberian beasiswa, promosi internasionalisasi universitas-universitas Jerman dan promosi pertukaran ilmu pengetahuan (Knudsen, 2023).

Meskipun banyak universitas negeri dan swasta yang menawarkan gelar sarjana dan magister di Indonesia, banyak pelajar Indonesia yang memilih belajar di luar negeri. Mereka ingin mendapatkan pendidikan yang lebih baik di luar negeri dan berharap mendapatkan kesempatan kerja yang baik ketika mereka kembali ke negara tempat mereka belajar atau Indonesia. Mereka dapat memperluas keterampilan dan pengalaman mereka di luar negeri dan

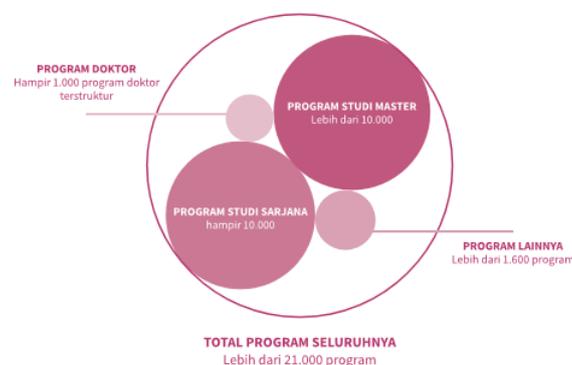
membawa kembali pengetahuan yang berharga bagi pembangunan Indonesia. Jumlah pelajar Indonesia di Jerman meningkat sebesar 87,2% antara tahun 2012 dan 2017 menjadi total 4.669 orang. Hal ini menjadikan Jerman sebagai negara tujuan studi luar negeri terpopuler di Eropa dan negara terpenting kelima di dunia (German Academic Exchange Service, 2022).

DAAD adalah organisasi pendanaan terbesar di dunia untuk pertukaran pelajar dan ilmuwan internasional. Organisasi ini terutama bertindak sebagai mitra sipil independen dari Kementerian Luar Negeri Federal (AA). Selain itu, DAAD bertindak sebagai perantara antara berbagai mitra dan komunitas dan sebagai organisasi otonom universitas-universitas Jerman. Dukungan kuat yang terus menerus dari pemerintah Jerman terhadap program pertukaran dan DAAD adalah contoh bagaimana teori diplomasi pengetahuan telah menjadi yang terdepan dalam institusi kebijakan luar negeri tradisional.

Di Indonesia, DAAD membuka kantor di Jakarta pada tahun 1990. Jika Jerman ingin membuat terobosan baru di Indonesia dan negara-negara lain, Jerman harus memungkinkan lembaga-lembaga pendidikannya memainkan peran dalam mengintegrasikan sektor pengetahuan dunia. Hal ini dapat dicapai dengan merancang atau mendesain ulang instrumen yang tersedia di dalam DAAD secara tepat. Terdapat permintaan yang besar terhadap peluang doktor di luar negeri dan beberapa program pemerintah kini membantu mendanai pelatihan lebih lanjut.

Pada tahun 2015 saja, DAAD mendukung 127.039 orang di seluruh dunia, 51.627 di antaranya adalah orang asing yang belajar di Jerman, mengunjungi Jerman atau mengambil bagian dalam proyek bersama. Sisanya adalah orang Jerman yang pernah menghabiskan waktu di luar negeri untuk tujuan studi atau penelitian. Permintaan untuk belajar di Jerman di masa depan diperkirakan akan meningkat, terutama karena banyak pelajar dari negara-negara Asia dan negara berkembang lainnya yang mengambil mata pelajaran ini (Reuter, 2019).

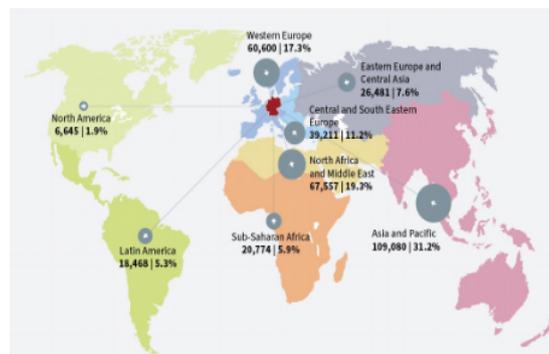
Pada tahun 2022, DAAD dan program Uni Eropa telah memberikan dana kepada lebih dari 140.000 individu di seluruh dunia. Beberapa program tersebut meliputi satu tahun di luar negeri bagi mahasiswa sarjana hingga studi doctoral. DAAD mendukung aktivitas internasional institusi pendidikan tinggi Jerman melalui layanan promosi, acara, penerbitan, dan pelatihan (DAAD, 2023).



Gambar 2. Program Studi di Jerman.

Sumber: (DAAD, 2023)

Salah satu ciri dari pendidikan tinggi di Jerman adalah dukungan dana dari pemerintah di mayoritas institusi pendidikan tinggi. Sekitar dua pertiga dari seluruh institusi pendidikan tinggi dioperasikan dan didanai oleh pemerintah. Di samping itu, lebih dari 110 institusi pendidikan tinggi swasta dan hampir 40 institusi yang dijalankan oleh gereja diakui oleh negara. Data terbaru menunjukkan ada sekitar 2,9 juta mahasiswa yang terdaftar di institusi pendidikan tinggi Jerman pada semester musim dingin 2022/2023. Sekitar 1,7 juta di antaranya menempuh studi di universitas Jerman. Selain itu, universitas terapan di Jerman memiliki sekitar 1,1 juta mahasiswa dan universitas di bidang seni hanya 38.000 mahasiswa. Sekitar 12% memilih institusi swasta dan sekitar 12% persen mahasiswa di Jerman berasal dari luar negeri. Jumlah mahasiswa yang terdaftar di universitas Jerman sekitar 350.000 merupakan mahasiswa internasional di Jerman (DAAD, 2023).



Gambar 3. Asal Wilayah Mahasiswa Internasional di Jerman.

Sumber: (DAAD, 2023).

Beasiswa internasional seperti DAAD bertujuan untuk menarik mitra global yang dapat diandalkan untuk kolaborasi di masa depan. Menurut survei DAAD, mahasiswa magister luar negeri yang didukung oleh beasiswa DAAD memiliki sikap positif terhadap hubungan masa depan mereka dengan Jerman atau institusi pendidikan Jerman. 95% dari mereka yang disurvei ingin berkomunikasi secara dekat dengan warga negara Jerman, 96% setuju untuk bekerja sama dengan organisasi Jerman di masa depan, dan 83% ingin bekerja di institusi Jerman di negara asal mereka.

Tertiary Institution Category	State	Privat	Total
Akademi (Academy)	83	1,013	1,097
Politeknik (Polytechnic)	109	147	256
Sekolah Tinggi (Upper School)	69	2,388	2,458
Institut (Institute)	52	127	179
Universitas (University)	82	481	563
TOTAL	395	4,156	4,553

Tabel 3. Institusi Pendidikan Tinggi Indonesia.

Sumber: (Reuter, 2019).

Institusi yang mempunyai kegiatan penelitian terbanyak di Indonesia adalah Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Indonesia (UI), Universitas Gadjah Mada (UGM), Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Institut Pertanian Bogor (IPB), dan Ini adalah dua lembaga Pendidikan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan Pusat Penelitian

Kehutanan Internasional (CIFOR). Pada tahun 2016, terdapat 49 lembaga mitra Indonesia dan Jerman yang berkolaborasi dalam total 130 proyek kerja sama, dimana 37 diantaranya merupakan proyek yang hanya bekerjasama dengan ITB dan UGM (Reuter, 2019).

Dalam situasi yang berubah ini, DAAD harus terus beradaptasi. Misalnya, sebagai bagian dari Program Beasiswa Indonesia-Jerman (IGSP), yang merupakan kolaborasi antara Direktorat Pendidikan Tinggi Indonesia (DIKTI) dan DAAD, para dosen saat ini diberikan dana yang memadai untuk studi mereka di Jerman. Program dosen bernama BUDI (Beasiswa Unggulan Dosen Indonesia) memberikan beasiswa kepada 500 mahasiswa dalam negeri dan 50 mahasiswa internasional pada tahun 2017 untuk melatih dosen. Sementara itu, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), sebuah lembaga pendanaan di bawah Kementerian Keuangan, mulai menawarkan beasiswa domestik dan internasional untuk studi master dan doktoral pada tahun 2012. (7,200 beasiswa diberikan pada tahun 2016, termasuk sekitar 1.500 untuk belajar di luar negeri) (Reuter, 2019). Penggabungan DIKTI dan Kementerian Riset (RISTEK) pada tahun 2015 akan membantu mempercepat reformasi menuju integrasi lebih lanjut penelitian ke dalam pengajaran pendidikan tinggi.³

Pada tahun 2017, UE memberikan dana sebesar 216,268 USD kepada Program mobilitas untuk tiga program pertukaran antara universitas mitra di Jerman dan Indonesia (Reuter, 2019):

German Partner	Indonesian Partner	Field of Study
University of Hannover	Institut Seni Indonesia Yogyakarta	Design and Media
Technical University Dresden	Universitas Negeri Yogyakarta; University of Indonesia	Computational Logic
Westphalian University of Applied Science (WH)	Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya	Economics and Journalism

Tabel 4. Kerjasama Jerman dan Indonesia dengan Pendanaan Erasmus

Sumber: (Reuter, 2019).

Tabel diatas merupakan contoh kemitraan yang sangat penting. Misalnya, Program Mobilitas Internasional Erasmus sedang berlangsung antara Universitas Katolik Atma Jaya dan Universitas Westphalian (WH). Bagi Jerman, arah kebijakan ini berarti mempertimbangkan lebih jauh kebutuhan inovasi spesifik perekonomian dan masyarakat Jerman. Hal ini mencakup, misalnya, memanfaatkan kolaborasi universitas secara lebih terarah untuk mencapai kualifikasi berbasis sains dan pencapaian ilmiah di bidang masa depan, khususnya teknologi digital. Model internasionalisasi baru yang diterapkan adalah model *top-down* yang berorientasi bisnis, di mana kemitraan internasional strategis ditentukan oleh manajemen universitas, dan bukan model *bottom-up* yang didasarkan pada hubungan pribadi antar akademisi.

Pertukaran pendidikan tidak dapat diabaikan sebagai alat diplomasi pengetahuan yang efektif dalam tatanan dunia saat ini. Hal ini merupakan alat penting dalam mencapai dominasi

³ DAAD memiliki Nota Kesepahaman dengan RISTEK-DIKTI untuk melayani tujuan ini, dan mempertahankan hubungan yang sangat erat.

di bidang politik dan ekonomi dunia. Pendidikan juga membantu memperbaiki situasi ekonomi dan politik suatu negara. Negara-negara yang bisa membanggakan kemajuan dan keunggulannya saat ini, baik secara ekonomi, sosial, atau politik, hanya dapat mencapai hal tersebut dengan menciptakan dan mendukung sistem berbasis pengetahuan bagi warganya untuk berinteraksi, terlibat, dan berkomunikasi dengan negara lain. Pertukaran pendidikan internasional adalah cara sempurna untuk mencapai tujuan ini.

Kesimpulan

Diplomasi pengetahuan digunakan untuk memperkuat *soft power* suatu negara. Masuknya warga negara asing yang merupakan aktor non-negara yang penting dalam dunia teknologi tinggi saat ini dilakukan dengan harapan negara tuan rumah akan menarik dan merayu warga negara asing tersebut. Analisis kami menunjukkan bahwa program pertukaran sering kali dapat dirancang untuk mencapai tujuan kebijakan tertentu. Dominasi bahasa dan budaya Inggris di negara-negara berbahasa Inggris merupakan contoh bagaimana pendidikan dapat digunakan untuk memajukan nilai-nilai dan sikap kebangsaan. Untuk meningkatkan pemahaman budaya internasional dan kedudukan globalnya, banyak negara telah mendirikan berbagai program pendidikan internasional, seperti Badan Informasi Amerika Serikat, *British Council*, *German Academic Exchange Service (DAAD)*, *Goethe Institute*.

Jerman telah bekerjasama dengan beberapa universitas gabungan internasional di negara-negara yang menganggap penting untuk memperkuat hubungan bilateral guna membuka jalan bagi perluasan kehadiran industri Jerman. Memanfaatkan model pendidikan dan penelitian terapan Jerman untuk mengembangkan program akademik relevan yang memenuhi kebutuhan sumber daya manusia Indonesia, membangun kapasitas penelitian teknologi tinggi di Indonesia melalui kemitraan antara akademisi dan bisnis Indonesia dan Jerman, dan memperkuat hubungan dan kepercayaan antara negara. Program DAAD diharapkan dapat memanfaatkan ilmu dan pengalaman yang diperoleh di Jerman untuk berkontribusi pada pengembangan sistem ekonomi dan sosial yang berorientasi demokratis yang bertujuan untuk mengatasi kesenjangan sosial di negara asalnya.

Daftar Pustaka

- Auer, C., & Srugies, A. (2013). *Public Diplomacy in Germany* Figueroa Press Los Angeles.
www.uscpublicdiplomacy.org
- Byrne, C., & Hall, R. (2013). Realising Australia's international education as public diplomacy. *Australian Journal of International Affairs*, 67(4), 419–438.
<https://doi.org/10.1080/10357718.2013.806019>
- Cowan, G., & Cull, N. J. (2008). Public diplomacy in a changing word. *Annals of the American Academy of Political and Social Science*, 616(1), 6–8.
<https://doi.org/10.1177/0002716207312143>
- DAAD. (2023). *STUDI DI JERMAN Panduan Praktis untuk Mahasiswa Internasional*.
- Doğan, A. M. (2019). *PUBLIC DIPLOMACY PERCEPTIONS: ELEMENTS OF SOFT POWER IN GERMANY AND TURKEYS FOREIGN POLICY*.
- F. Cooper, A., Heine, J., & Thakur, R. (2013). *Modern Diplomacy*.
- German Academic Exchange Service. (2022). *Science Diplomacy for a Multipolar World DAAD PERSPECTIVES*.
- Jozkowski, A. C. (2017). Reason & Rigor: How Conceptual Frameworks Guide Research, 2nd Edition (2017). *Occupational Therapy In Health Care*, 31(4), 378–379.
<https://doi.org/10.1080/07380577.2017.1360538>
- Kavalski, E. (2011). Number 1 Article 19 Part of the Anthropology Commons, Critical and Cultural Studies Commons, Environmental Studies Commons, and the Sociology Commons Recommended Citation Recommended Citation Kavalski. In *Journal of International and Global Studies* (Vol. 3, Issue 1). Oxford University Press.
<https://digitalcommons.lindenwood.edu/jigs>
- Knight, J. (2014a). *Higher Education and Diplomacy*.
- Knight, J. (2014b, January). *The Limits of Soft Power in Higher Education*.
<https://www.universityworldnews.com/post.php?story=20140129134636725>.
- Knight, J. (2022). *Understanding and Applying the Key Elements of Knowledge Diplomacy: The role of international higher education, research and innovation in international relations*.
- Knudsen, E. (2023). *ifa External Cultural Policy Monitor - Germany: Country Report*.
- McVeigh, B. J. (2010). Soft Power Superpowers: Cultural and National Assets of Japan and the United States (review). *The Journal of Japanese Studies*, 36(2), 379–383.
<https://doi.org/10.1353/jjs.0.0166>
- Nye, J. (2017). *Soft Power and Higher Education*.
- Nye, J. S. . (2006). *Soft power : the means to success in world politics*. PublicAffairs ; Perseus Running [distributor].

- Pamment, J. (2013). *New Public Diplomacy in the 21st Century A comparative study of policy and practice*.
- Pekşen, S., & Leišytė, L. (n.d.). *Germany: Policies for Internationalization*.
- Peterson, P. M. (2013, September). *Global higher education as a reflection of international relations*.
- Reuter, T. A. (2019). *German Cultural Diplomacy in Indonesia: Building Cooperation in a Changing World*. <https://www.researchgate.net/publication/346098995>
- Rizvi, F. (2020, February). *Public Diplomacy and the Internationalisation of Higher Education*.
- Snow, N., & Taylor, P. (2009). *Routledge Handbook of Public Diplomacy*.
- Spangler, J., & Chouu, C. P. (2018). *Education Innovation Cultural and Educational Exchanges between Rival Societies Cooperation and Competition in an Interdependent World*. <http://www.springer.com/series/10092>
- Times Higher Education. (2023). *World University Rankings*. <https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2023/world-ranking>.
- Wojciuk, A., Michatek, M., & Stormowska, M. (2015). Education as a source and tool of soft power in international relations. *European Political Science*, 14(3), 298–317. <https://doi.org/10.1057/eps.2015.25>